

# **PENGEMBANGAN *OUTER RING FISHING PORT* BERBASIS MASYARAKAT UNTUK MENEKAN *IUU FISHING* DAN MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN NELAYAN**

Domu Simbolon

## **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berciri nusantara (*archipelagic state*) terbesar di dunia, yang terdiri atas lautan dan pulau-pulau kecil. Luas wilayah perairan laut Indonesia diperkirakan mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup> atau sekitar dua per tiga dari wilayah Indonesia, dan hanya sekitar 1,9 juta km<sup>2</sup> merupakan wilayah daratan. Indonesia juga tercatat sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki sekitar 17.480 pulau, dan negara tropis yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia (sekitar 95.000 km) setelah Kanada.

Secara geografis kepulauan dan perairan Indonesia terletak di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, dan antara benua Asia dan Australia. Perairan laut Indonesia ini merupakan perairan yang mempunyai karakteristik yang unik karena fenomena biologi dan ekologi perairan dipengaruhi oleh massa air yang berasal dari Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta dipengaruhi pola musim. Wilayah perairan yang satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan berbagai selat yang bervariasi lebar dan kedalamannya. Keadaan ini menyebabkan terjadinya dinamika oseanografi dan sumberdaya ikan yang cukup tinggi di perairan Indonesia, baik secara spasial maupun temporal.

Kondisi bio-geofisik yang dimiliki Indonesia merupakan suatu anugerah karena laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang dimiliki Indonesia relatif kaya dan dapat memberikan nilai ekonomis tinggi bagi industri perikanan, pariwisata dan industri maritim, pelayaran dan lain-lain. Namun demikian, kondisi alam dan wilayah geografis tersebut pada sisi lain juga dapat memberikan peluang kepada banyak pihak untuk melakukan pelanggaran terhadap pemanfaatan potensi sumberdaya ikan, pesisir dan pulau-pulau kecil. Intensitas pelanggaran ini semakin tinggi akibat sistem pengawasan dan penegakan hukum yang belum

memadai dan atau tidak konsisten. Sebagai konsekuensi logisnya, maka aktivitas *illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing*, bahkan penyelundupan dan perompakan sering terjadi dalam wilayah perairan nusantara yang luas tersebut.

Potensi sumberdaya perikanan dan kelautan Indonesia seyogianya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu modal dasar bagi pembangunan ekonomi nasional, peningkatan devisa negara, perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan penduduk Indonesia pada umumnya dan masyarakat pesisir khususnya. Namun, sangat disayangkan bahwa potensi sumberdaya tersebut belum dapat dikelola secara optimal. Faktor yang mempengaruhinya antara lain 1) kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi daratan (*land based oriented*) yang menyebabkan sumberdaya perikanan dan kelautan terabaikan, 2) pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan secara berlebihan (*over exploited*) tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, dan 3) lemahnya koordinasi dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan karena selama ini lebih bertumpu pada pendekatan sektoral, sehingga pengelolaan sumberdaya tersebut terfragmentasi atau tidak terintegrasi, 4) dan sebagainya.

Lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan terlihat jelas dari kenyataan bahwa masing-masing pelaku pembangunan melakukan pengaturan dan pemanfaatan sumberdaya menurut kepentingannya, sehingga menimbulkan kompetisi dan konflik dalam pengelolaannya, dan degradasi sumberdaya tersebut semakin besar yang berimplikasi memarjinalkan masyarakat pesisir, termasuk nelayan. Untuk mengurangi laju degradasi sumberdaya dan marginalisasi masyarakat pesisir ini, dibutuhkan keperdulian dan partisipasi dari berbagai pihak, baik pihak pemerintah maupun swasta. Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, maka salah satu alternatif upaya yang dapat ditempuh adalah dengan melibatkan dan memberdayakan pihak swasta yang selama ini belum mendapat porsi yang luas sebagai mitra pemerintah, sehingga masih ragu-ragu untuk menginvestasikan modalnya di bidang perikanan dan kelautan.

Berdasarkan uraian di atas, maka pemerintah perlu memberikan peluang kepada swasta (investor) untuk mengadakan dan mengelola sarana dan prasarana seperti pelabuhan perikanan terutama di wilayah terluar dan pintu masuk yang potensial bagi kapal ikan asing untuk mencuri ikan di perairan Indonesia. Selain untuk membantu pemerintah dalam rangka menekan *IUU fishing*, pengelolaan perikanan dan pelabuhan perikanan oleh pihak swasta ini tentu saja disertai dengan kewajiban lain untuk mencegah laju degradasi sumberdaya akibat penggunaan teknologi penangkapan yang tidak berwawasan lingkungan, dan mencegah marginalisasi nelayan melalui pemberdayaan nelayan lokal, serta memberi perbaikan ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja. Dengan demikian, kehadiran pihak investor swasta dalam pengelolaan *outer ring fishing port* akan berimplikasi terhadap optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan, pengembangan pusat pertumbuhan sektor perikanan dan kelautan pada suatu kawasan di wilayah terluar perairan Indonesia, serta diharapkan dapat berperan untuk mendukung strategi pengembangan kawasan dari segi geopolitik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

### **SUMBERDAYA PERIKANAN DAN KELAUTAN SEBAGAI PELUANG DAN TANTANGAN**

Potensi sumberdaya alam yang ada di wilayah pesisir, lautan dan pulau-pulau kecil yang memiliki nilai ekonomis tinggi meliputi sumberdaya hayati, sumberdaya non-hayati dan jasa-jasa lingkungan. Potensi tersebut merupakan suatu keunggulan dan peluang yang potensial dijadikan sebagai *prime mover* pengembangan perekonomian nasional, namun sekaligus tantangan bagi pemerintah, nelayan dan *stakeholders* lainnya apabila tidak dapat dikelola secara optimal. Jenis dan kelimpahan sumberdaya ikan yang terkandung di perairan Indonesia cukup besar, dan sangat ironis karena potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, sehingga kontribusi sektor perikanan dan kelautan terhadap perekonomian nasional masih relatif rendah dibandingkan dengan komoditi lainnya.